

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response



## IMPLIKASI PMK 89/23 TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Adhi Prasetyo

Hasil pertemuan antara pihak Indonesia-China pada 14 Februari 2023 disepakati nilai cost overrun sebesar USD 1,2 miliar atau setara Rp18,8 triliun. Konsorsium Indonesia dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (KAI) akan menanggung sebesar 60 persen atau Rp11,2 triliun. Perpres Nomor 93 Tahun 2021 mengatur dalam rangka memenuhi kewajiban akibat kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCBJ) dan/atau terdapat kewajiban perusahaan patungan yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan Penyertaan Modal Negara (PMN), dilakukan oleh PT. KAI selaku pimpinan konsorsium. Pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman dan bunga lain yang timbul berpotensi akan ditanggung oleh PT. KAI apabila PT KCIC tidak dapat membayar pokok dan bunga Shareholder Loan (SHL) kepada PT KAI.

Sebelumnya, notulensi rapat Komite KCJB pada tanggal 3 dan 8 Februari 2023 menunjukkan China Development Bank (CDB) meminta struktur penjaminan bukan berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha, tetapi dalam bentuk penjaminan kredit untuk pinjaman yang diterima maupun global bond yang diterbitkan. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam hal ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai guarantor dan first loss absorption, yang saat ini sudah diterima oleh international institution.

Hasil proyeksi keuangan PT. KAI, menunjukkan bahwa kemampuan arus kas perusahaan cukup untuk mendukung kegiatan operasional, pembayaran utang dari pinjaman saat ini serta tambahan utang dari pinjaman CDB. Hal ini ditunjukkan dengan capaian PT. KAI dalam meraih laba sebesar Rp1,78 triliun di tahun 2022. Laporan keuangan PT. PII sebagai penjamin juga secara keseluruhan cukup bagus, ini terlihat dari efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktivitynya sehingga sejak 5 tahun terakhir laba berjalan terus meningkat.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.08/2022, menetapkan gearing ratio PT. PII sebesar maksimal 12 kali. Hingga Juli 2023, gearing ratio PT PII berada pada 5,9 kali berdasarkan jumlah eksposur maksimum atas 40 proyek infrastruktur yang dijamin sebesar Rp82.751,0 miliar. Masuknya KCJB maka berpotensi akan menambah risiko atas klaim penjaminan PT. PII, sehingga guna menjaga kecukupan modal PT. PII maka pemerintah kedepan bisa saja memberikan Penyertaan Modal Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK Nomor 89 Tahun 2023.

Apabila jumlah klaim melebihi porsi yang ditanggung oleh PT. PII sebagai First Loss, maka PT. PII menyampaikan tagihan atas jumlah klaim yang menjadi porsi pemerintah kepada Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara atas kewajiban penjaminan pemerintah. Pemerintah sendiri dapat menggunakan dana cadangan atas penjaminan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan Pemerintah.

Guna menghindari gagal bayar dan menambah beban keuangan negara melalui pemberian PMN kepada PT. PII, maka PT. KAI perlu membuat rencana mitigasi risiko gagal bayar dimana didalamnya memuat peta risiko gagal bayar, langkah-langkah mitigasi risiko gagal bayar dan upaya terbaik PT. KAI untuk memenuhi pembayaran pinjaman. Selanjutnya PT. KAI perlu memastikan bahwa adanya pinjaman tidak menimbulkan harga tiket layanan penumpang yang selama ini menjadi penyumbang pendapatan terbesar PT. KAI. Selain itu, Pemerintah wajib untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan serta pemenuhan kewajiban PT. KAI serta melakukan koordinasi secara berkala dengan PT. KAI dan PT. PII guna membahas dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan pengelolaan risiko atas pelaksanaan pembiayaan serta pemenuhan kewajiban PT. KAI dan pelaksanaan penugasan Penjaminan melalui PT. PII. Pemerintah juga perlu menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Beberapa poin strategi tersebut perlu dipastikan dijalankan Pemerintah oleh DPR RI melalui fungsi pengawasan. Hal ini dirasa perlu agar penjaminan yang dilakukan oleh PT. PII terhadap proyek KCJB tidak membebani keuangan negara di kemudian hari.